

**ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP PASAL 40  
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

**WINDU FITRIA**

**NPM: 1421020150**

**Jurusan: Siyasah Syar'iyah**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**1440 H / 2018 M**

**ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP PASAL 40  
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

**WINDU FITRIA**

**NPM: 1421020150**

**Jurusan: Siyasa Syar'iyah**

Pembimbing I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.

Pembimbing II : Drs. Henry Iwansyah, M.A.

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**1440 H / 2018 M**

## ABSTRAK

Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dilatarbelakangi adanya kasus korupsi yang merajalela di Negara ini, kemudian banyak pihak yang merasa dirugikan dengan adanya Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, adanya ketentuan ini sedikit banyak telah mengintimidasi hak asasi seseorang. Seseorang berhak untuk dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan hakim atas kasusnya, semua orang berhak untuk mendapatkan SP3 layaknya kasus-kasus lain. Selain itu tentunya tidak boleh dilupakan prinsip kesamaan dimata hukum, dimana dimata hukum tidak ada yang dibeda-bedakan baik itu yang tersangkut kasus korupsi maupun yang kasus-kasus lainnya. Permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai: Mengapa KPK berdasarkan pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002 tidak dapat mengeluarkan SP3 dan bagaimana tinjauan siyasah atas tidak dapatnya KPK mengeluarkan SP3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendasar mengapa KPK tidak dapat mengeluarkan SP3 dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan siyasah terhadap KPK dan SP3.

Data penelitian ini diperoleh dari buku-buku referensi yang ada korelasi dengan judul penelitian, jurnal dan artikel-artikel dan lain-lain. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu memaparkan atau menjelaskan data yang diperoleh dengan selanjutnya dianalisis dengan metode deduktif, dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus, yaitu tentang analisis fiqh siyasah terhadap pasal 40 undang-undang no. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Ketidakwenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) mengandung maksud yang luhur, yaitu untuk lebih bisa meningkatkan data kerja Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melaksanakan tugas nya dengan tepat sasaran, yang nantinya berdampak pada pemulihan kepercayaan masyarakat Indonesia pada hukum serta penegak hukum di Indonesia. Adanya pasal 40 UU No.30 Tahun 2002 mendorong KPK untuk selalu bersikap hati-hati serta serius dalam menetapkan setiap seseorang yang di sangka melakukan tindak pidana korupsi. Dengan ketentuan yang demikian maka tidak heran jika kemudian dalam UU No.30 Tahun 2002 dicantumkan ketentuan mengenai ketidakwenangan KPK untuk mengeluarkan SP3. Dengan demikian, maka tentu saja ini bersesuaian dengan prinsip hukum pidana Islam menghendaki adanya kehati-hatian dan juga menempatkan seseorang dalam posisi bersalah maupun tidak bersalah.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Sekretaris : A. Letkol. H. Endero Suratmin, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Sukarame, Lampung*

**PERSETUJUAN**

**Nama** : Windu Fitria  
**NPM** : 1421020150  
**Prodi** : Siyasah  
**Fakultas** : Syariah  
**Judul** : Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 40  
Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang  
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

**MENYETUJUI**


Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 23 April 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.**  
**NIP. 195802011986021002**

  
**Drs. Henry Iwansyah, M.A.**  
**NIP. 19581207198703100**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Siyasah**

  
**Drs. Susiadi AS., M.Sos.I**  
**NIP. 196908081993032002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: Jl. Letkol. H. Endero Suratmin, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Sukaramé, Lampung*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **"ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PASAL 40 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)"** di ujikan dalam sidang munaqosyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Jum'at, 13 juni 2018.**

**TIM MUNAQOSYAH**

**Ketua : Marwin, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.I**

**Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.**

**Penguji II : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197009011997031002**

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ

بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil' alamin.* Dengan menyebut nama Allah SWT dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafa'atnya. Kupersembahkan Skripsi Ini Kepada Orang-Orang Yang Tercinta dan tersayang, diantaranya:

1. Ibuku (Yurida), Kakekku (Abdur Rohim), Nenekku (Alm, Amiah) dan Ayahku (Andi Hanapiah) yang telah mendidik dan membesarkanku sejak balita hingga dewasa, terimakasih atas semangat, dukungan, kesabaran, nasihat dan kasih sayang yang kalian berikan, dengan do'a dan segenap jasa-jasanya yang tak terbilang demi keberhasilan cita-citaku. Semoga Allah selalu member nikmat-Nya kepada Ibu, Kakek, Nenek dan ayah.
2. Adikku Tersayang dan Tercinta yang selalu menjadi kebanggaan ku (Rosa Ilmi) dan sepupuku terkasih (Tiyas Sabilta, Umuro Arzakina, Parhan Fiska, Seli Amelia Refizel, Tiara Sagita, Tangguh Habibullah Novelia Pertina).
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.
4. Paman dan Tante ku tersayang yang juga selalu memberi suport (Elmizar, Mega Wati, S.Pd, Uliya, Saiful Anwar, Rifa Danila, Eliyana, Yulistina, S.Pd dan Sanwani).
5. Teman-teman seperjuangan Jurusan Siyasah angkatan 2014 khususnya kelas C yang tidak bias disebutkan satu-persatu, terimakasih atas semangat dan doanya.
6. Dan terimakasih untuk seseorang yang selalu memberiku semangat dan setia mendampingi khususnya (Deni Sepriansah) terimakasih atas segalanya.
7. Sahabat-sahabat ku yang luar biasa ( Dwi Anggin, Dwi Meinanda, Endah Budi Utami, Ratih Selawati, Novia Lidia, Yatim Puji, Fera Siska, Anita Sundari, Diana Tami).

8. Teman-teman KKN kelompok 21 Khususnya kawan satu kamar ( Eka, Demi, Mutiara dan Astuti) yang selalu mendoakan.





## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Sukamara, Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus pada tanggal 28 Mei 1996. Dengan nama lengkap “Windu Fitria” anak pertama dari dua bersaudara. Dari buah cinta kasih pasangan Bapak yang bernama Andi Hanapiah dan Ibu Yurida. Adapun riwayat pendidikan sebagai berikut:

Penulis menempuh pendidikan berawal dari SD Negeri 1 Sukamara Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus selesai pada tahun 2008. Penulis melanjutkan sekolah lanjutan tingkat pertama di Mts Nurul Falah Al-amin Pardasuka Kabupaten Pringsewu selesai pada tahun 2011, Sedangkan pendidikan sekolah lanjut tingkat menengah atas di tempuh di SMK Negeri 1 Sukadana Kabupaten Lampung Timur selesai pada tahun 2014. Dan pada tahun yang sama 2014 penulis diterima di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Jurusan Siyasah.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah aktif di berbagai kegiatan organisasi baik intra maupun DEKA & HMJ. Di HMJ menjabat sebagai Ketua HJM (Himpunan Mahasiswa Jurusan) dan Di organisasi Ekstra yaitu PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Rayon Fakultas Syariah Komisariat UIN Raden Intan Lampung sebagai pengurus Ketua KOPRI tahun 2015-2017.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, taufiq dan hidayahNya serta petunjuk dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PASAL 40 UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)**. Shalawat beriring salam kami semoga tersampaikan kepada Nabi Allah yang mulia yakni Rosulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat yang selalu mengikuti ajaran beliau.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan study pada program Stara Satu (SI) Jurusan Siyasaah Fakultas Syariaah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum(SH). Dalam bidang ilmu Syari'ah.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha penulis secara mandiri, banyak sekali penulis menerima motivasi bantuan pemikiran, dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof.Dr.H.Moh.Mukri,M.Ag. beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syariaah Bapak Dr.Alamsyah,S.Ag.,M.,Ag serta para wakil Dekan Fakultas Syariaah UIN Raden Intan Lampung.

3. Ketua Jurusan Siyasah Bapak Drs Susiadi AS.,M. Sos.i dan sekretaris jurusan Siyasah Bapak Frenki M.Si.
4. Pembimbing I Bapak Drs. H. Chaidir Nasution, M.H. dan Pembimbing II Bapak Drs. Henry Iwansyah, M.A. Yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen, serta para Staf Karyawan Fakultas Syariah.
6. Pemimpin dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Universitas yang telah memberikan informasi, data, refrensi dan lain-lain.
7. Bapak dan Ibu guruku dari SD, SMP, dan sampai SMA terimakasih atas ilmunya dan pengalaman yang kalian berikan.
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiqnya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT.Amin Yarobbal a'lam.

Bandar Lampung, 16 Maret 2018

Penulis

Windu Fitria

NPM. 1421020150

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	9

## **BAB II PRINSIP SIYASAH DALAM KEHDUPAN BERNEGARA**

A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Siyasa.....	12
B. Prinsip-prinsip Siyasa.....	20
C. Siyasa Dalam Penegakan Hukum.....	29

## **BAB III TENTANG KOMISI PEMBERANTASANKORUPSI (KPK)**

A. Latar Belakang Lahirnya .....	36
B. Tugas Dan Wewenang.....	43
C. Pimpinan KPK.....	45
D. Pasal 40 Tentang Penghentian Penyidikan.....	46
E. Dampak Korupsi Dalam Kehidupan Bangsa.....	54

## **BAB VI ANALISA DATA**



A. Ketidak Wewenangan KPK Mengeluarkan SP3 Menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002.....	61
B. Pandangan Siyasah Terhadap Ketidakwenangan KPK Mengeluarkan SP3.....	62

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan interpretasi di kalangan pembaca terhadap judul Skripsi ini, maka penulis perlu mengemukakan pengertian judul sebagai berikut :

**“ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PASAL 40 UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)”.**

#### **1. Analisis**

Analisis adalah menguraikan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil.

#### **2. Fiqh Siyasah**

Fiqh Siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.<sup>1</sup>

#### **3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara yang bertugas untuk menangani masalah korupsi yang ada di Negara RI ini, yang berlandaskan pada Undang-Undang No 30 tahun 2002. Undang-

---

<sup>1</sup>H.A. Djazuli, *Fqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu -rambu Syariah*, cetakan ke 4, Kencana, Jakarta, 2009, hlm 1.

Undang ini di bentuk berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang tersebut diatas.<sup>2</sup> Maka dalam Undang-Undang tersebut terdapat tidak berwenangnya KPK dalam mengeluarkan SP3 yang terkandung dalam pasal 40 UU Nomor 30 tahun 2002, yang mana alasan tidak diberiwewenang tersebut agar lembaga KPK berhati-hati dalam menentukan tersangka dan semua kasus yang sudah ditangani KPK harus final di pengadilan

## **B. Alasan Memilih Judul**

Ada beberapa alasan yang menari, sehingga penulis terdorong untuk membahas masalah ini dalam bentuk karya ilmiah, antara lain:

### **1. Alasan objektif**

- a. Penghentian penyidikan atas dugaan adanya tindak pidana korupsi khususnya,kadang kala disalah gunakan. Sehingga upaya penegakanhukum tersebut tidak ada kejelasan.
- b. KPK sebagai salah satu lembaga negara yang diamanati untuk menangani tindak pidana korupsi yang menggerogoti keuangan negara, sehingga tak dapat mengeluarkan SP3.

### **2. Alasan subyektif**

---

<sup>2</sup>Artikel ini diakses pada tanggal 17 November 2017 pada [http://id.wiki/Komisi\\_Pemberantasan\\_Korupsi](http://id.wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi)

- a. Pembahasan ini diangkat dikarenakan belum ada yang membahas pembahasan ini dalam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Permasalahan Analisis fiqh siyasah terhadap pasal 40 UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK sangat memungkinkan untuk dibahas dan diteliti karena tersedianya literatur yang menunjang dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini.

### C. Latar Belakang Masalah

Cita-cita para pendiri bangsa untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa masih belum menjadi kenyataan. Penyebab utamanya, para penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) masih lebih mengutamakan menjahtakan diri sendiri. Mereka dengan alasan demi kesejahteraan umum, bisa merancang sebuah tindakan yang justru memperkaya diri sendiri.<sup>3</sup>

Diantara masalah fundamental dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan adalah korupsi. Menurut Fockema Andrea, kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu pula berasal pula dari asal kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*, Prancis, yaitu *corruption*, dan

---

<sup>3</sup>"Indonesia Sarang Korupsi Sistemik", Berita Indonesia, 17 November 2017, h.15



Belanda, yaitu *corruptie* (*korruptie*). Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu "korupsi"<sup>4</sup>

Korupsi adalah suatu permasalahan besar yang merusak keberhasilan pembangunan nasional. Korupsi menjadikan ekonomi menjadi berbiaya tinggi, politik yang tidak sehat, dan moralitas yang terus-menerus merosot. Korupsi merupakan sebuah konsep yang sangat akrab di telinga semua orang Indonesia. Hampir setiap hari media massa mengungkapkan gejala-gejala penyelewengan dan penyalahgunaan dana, waktu, kekuasaan, dan fasilitas yang ada yang merupakan berbagai macam gejala korupsi. Kendatipun semua orang tidak menerima praktik-praktik korupsi, tetapi korupsi hampir melibatkan semua orang. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat, pengusaha, dan kaum pegawai, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang berhubungan dengan lembaga-lembaga sosial dan bahkan lembaga keagamaan. Di mana pun ketika ada kesempatan, orang akan melakukan korupsi.<sup>5</sup>

Sudah bukan menjadi rahasia umum, bahwa hampir semua instansi pemerintah di Indonesia sudah menjadi sarang korupsi sistemik. Disebut korupsi sistemik karena sudah menyatu dan membudaya dalam sistem birokrasi, serta bisa berlangsung dengan mulus dan dalam waktu lama tanpa bisa terendus semua penegak hukum dan aparat penegak hukum. Karena rancangannya memang dibuat sedemikian rupa sistemik, dan lepas dari jeratan

---

<sup>4</sup> Andi I-famzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan internasional* (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2006), h.4

<sup>5</sup> Munawar Fuad Noeh, *Islam Dan Gerakan Moral Anti Korupsi* (Jakarta, Zihru'l Hakim, 1997), Cet. Pertama, h.13

hukum. Celah hukum dimanfaatkan betul untuk berlaku korup. Semua prosedur administratif dibuat sedemikian rupa atau sama sekali barang bukti tidak ada yang tersisa, semua dibuat terlihat rapi dan sesuai prosedur. Kalaupun dugaan korupsi sempat masuk ranah hukum, gantian aparat penegak hukum malah bisa masuk jaringan korupsi yang sistemik itu.<sup>6</sup>

Masyarakat sudah terlanjur akrab dengan berbagai istilah yang termasuk dalam kategori korupsi. Kita mengenal istilah sogok, uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelican atau pelumas, uang pelancar dan beragam bentuk pelesetan lainnya. Dengan sendirinya, para aparat yang melakukan korupsi tersebut seperti biasanya mengeluarkan izin, lisensi, fasilitas, rekomendasi, yang menguntukan pemberi suap. Akhirnya, korupsi mejadi pola rutin dan keseharian, karena adanya saling menguntungkan bagi kelanggengan jabatan dan pembangunan itu sendiri. Dengan kata lain istilah pungli (pungutan liar) yang amat merugikan masyarakat, akhirnya diterima sebagai pungmi (pungutan resmi) yang makin membudayakan praktik korupsi.<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ini juga diatur kewenangan KPK bahwasannya dalam kasus penanganan atau penyelidikan KPK tidak diberi wewenang untuk mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan & Penuntutan)

---

<sup>6</sup>"Indonesia Sarang Korupsi Sistemik", *Berita Indonesia*, 17 November 2017, h.15

<sup>7</sup>Munawar Fuad Noeh, *Islam Dan Gerakan Moral Anti Korupsi* (Jakarta, Zihru'l Hakim, 1997), Cet. Pertama, h.41-42

Dilarangnya perbuatan korupsi dan tidak diberinya wewenang KPK mengeluarkan SP3 dalam Islam terdapat dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya:

*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahui.*<sup>8</sup>

Menurut Muhammad Ali As Says, memakan harta dengan bathil itu ada dua cara, yang pertama; mengambil dengan cara yang dzalim, seperti mencuri dan sebagainya, kedua; mendapatkannya dengan cara yang dilarang, seperti judi dan cara-cara lain yang dilarang oleh syara'.<sup>9</sup>

Usaha untuk memberantas korupsi sudah menjadi masalah global, bukan lagi nasional atau regional. Gejala korupsi ada pada setiap negara, terutama yang sedang membangun sudah hampir menjadi conditio sine qua non. Ada usaha terutama karena desakan rakyat banyak agar korupsi dibabat habis kalau perlu dengan hukuman darurat, seperti pidana yang berat, sistem perbalikan

---

<sup>8</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'andan Terjemanya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), halm 29

<sup>9</sup>Muhammad Ali As Says, *Tafsir Ayat Al Ahkam* (Beiruut, Darul Al Fikr, t th), Jilid 2, h.86

beban pembuktian, pembebasan penanganan korupsi dari instansi normal ke suatu badan independent yang dijamin integritasnya.<sup>10</sup>

Ada banyak cara untuk menanggulangi korupsi, antara lain dengan pembentukan lembaga khusus yang independent yang bertugas menangani masalah korupsi. Di Indonesia saat ini terdapat sebuah lembaga yang menangani masalah korupsi yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang berdasarkan pada Undang-Undang No 30 Tahun 2002. Dengan di tetapkannya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi yang mulai berlaku sejak tanggal 27 Desember 2002, dapat di lihat sebagai titik cerah yang membawa harapan dalam usaha pemberantasan korupsi di Indonesia. Artinya, dengan diadakannya perubahan terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 oleh Undang-Undang No. 30 tahun 2002, diharapkan Undang-Undang ini dapat lebih mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara efektif setiap bentuk tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara.

Pemeriksaan suatu perkara dilakukan oleh penyidik. Menurut pasal 1 ayat (1) :

Dinyatakan bahwa penyidik ialah polisi atau pejabat pegawai sipil yang diberi tugas oleh Undang-undang ini untuk menyelidiki.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara*(Jakarta, Sinar Grafika, Cet kedua 2005), h.6

<sup>11</sup>KUHP dan KUHPA,Bandung:Citra Media Wacana, 2009, hlm. 198



Proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik kalau tersangka yang diberitahu melalui suatu panggilan kepolisian mau menghadap secara baik-baik. Tetapi seringkali etikat baik seseorang yang dicurigai melakukan tindak pidana itu tidak ada. Terhadap yang terakhir ini perlu dilakukan penangkapan.<sup>12</sup> Menurut pasal 16 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan penyidik atas perintah penyidik dan penyidik pembantu.

Penuntutan merupakan tindakan berlanjut setelah selesai penyidikan dan tidak ada alasan penghentian penyidikan karena kurang bukti (yang biasanya dengan dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan (SP3), Dalam perkara korupsi tidak di kenal dengan adanya SP3 karena dalam kasus yang ditangani KPK harus berakhir di pengadilan.

Tidak berwenangnya KPK dalam mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan di atur dalam pasal 40 UUNo. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Oleh karena itu, penulis mengangkat isu tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAPPASAL 40 UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBRANTASAN KORUPSI"**.

---

<sup>12</sup>R. Abdoel Djamil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, 1990, hlm. 201-202

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Mengapa KPK berdasarkan pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002 tidak dapat mengeluarkan SP3?
2. Bagaimana tinjauan siyasah atas tidak dapatnya KPK mengeluarkan SP3?

#### **E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui secara mendasar mengapa KPK tidak dapat mengeluarkan SP3.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan siyasah terhadap KPK dan SP3.
2. Manfaat
  - a. Secara praktis agar masyarakat mengetahui tentang kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan masalah korupsi.
  - b. Secara praktis agar masyarakat mengetahui tentang kenapa tidak berwenang nya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi.

#### **F. Metode Penelitian**

- a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian dengan

cara mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari buku-buku, artikel-artikel, makalah, majalah, koran serta bahan-bahan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diangkat.

b. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan, yaitu dengan membaca buku atau literatur yang relevan dengan topik masalah dalam penelitian ini.

c. Sumber Data

1) Data Primer adalah sumber data penelitian langsung dari sumber aslinya, yaitu Al Qur'anul karim dan Hadist sebagai sumber utama fiqh siyasah. Dan Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan pembahasan penulis.

2) Data Sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti, yaitu artikel-artikel dan makalah-makalah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

d. Analisa Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dapat diamati. Dalam analisis kualitatif ini menggunakan metode berfikir induktif adalah cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk

menentukan hukum yang umum. Dan deduktif adalah cara berfikir yang di tangkap atau di ambil dari penataan yang bersifat umum lalu di tarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan metode ini dapat disaring atau ditimbang data yang telah terkumpul dengan metode ini data yang dianalisis, sehingga didapat jawaban yang benar dari permasalahan. Data-data tersebut akan diolah dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan pembasahan terhadap masalah-masalah yang berkaitan





## BAB II

### PRINSIP SIYASAH DAN KEHIDUPAN BERNEGARA

#### A. Pengertian dan Ruang Lingkup Siyasah

##### 1. Pengertian Siyasah

Kata siyasah berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus *Al-Munjid* dan *Lisan al-'Arab* berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Siyasah bisa juga berarti pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan. Abdul Wahhab Khallaf mengutip ungkapan Al-Maqrizi menyatakan, arti kata *siyasah* adalah mengatur. Kata *sasa* sama dengan *to govern, to lead*. *Siyasah* sama dengan *policy (of government, corproation, etc)*. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintahan dan politik. Artinya siyasah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

Secara terminologis dalam *Lisan al-'Arab*, *siyasah* adalah mengatur atau pemimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam *Al-Munjid* disebutkan, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan.

Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudataran.

Ibn al-Qayim yang dinukilnya dari Ibn' Aqil menyatakan: Siyasah juga suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rosul tidak menetapkan dan Allah tidak mewahyukannya. Dan siyasah adalah “pengurusan kepentingan- kepentingan (*mashalih*) umat manusia sesuai dengan syara’<sup>13</sup>.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudataran yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalannya.

## **2. Obyek Dan Metode Pembahasan**

Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan

---

<sup>13</sup>Dr. J. Suyuthi Pulungan, M.A. *Fiqh Siyasah Ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta, Raja Wali Pers, 1993), halm. 22-25

lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy: “Objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah ‘amah yang tetap”. Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf: “Objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya”. Secara garis besar maka objeknya menjadi, pertama, peraturan dan perundang-undangan, kedua, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan ketiga, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara. Metode yang digunakan dalam membahas Fiqh Siyasah tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas Fiqh lain, dalam Fiqh Siyasah juga menggunakan Ilm Ushul Fiqh dan Qowaid fiqh.

Secara umum, lingkup yang digunakan adalah:

a. Al-Ijma'

Al-Ijma' merupakan kesepakatan (konsensus) para fuqaha (ahli fiqh) dalam satu kasus. Misalnya pada masa khalifah Umar ra. Dalam mengatur pemerintahannya Umar ra melakukan musyawarah maupun koordinasi dengan para tokoh pada saat itu. Hal-hal baru seperti membuat peradilan pidana-perdata, menggaji tentara, administrasi negara dll, disepakati oleh sahabat-sahabat besar saat itu. Bahkan Umar ra mengintruksikan untuk shalat tarawih jama'ah 20 raka'at di masjid, merupakan keberaniannya yang tidak diprotes oleh sahabat lain. Hal ini dapat disebut ijma' sukuti.

b. Al-Qiyas

Dalam fiqh siyasah, qiyas digunakan untuk mencari umum al-ma'na atau ilat hukum. Dengan qiyas, masalah dapat diterapkan dalam masalah lain pada masa dan tempat berbeda jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai ilat hukum yang sama.

c. Al-Mashlahah al-Mursalah

Al-mashlahah artinya mencari kepentingan hidup manusia dan mursalah adalah sesuatu yang tidak ada ketentuan nash Al-Qur'an dan As-Sunah yang menguatkan atau membatalkan. Al-mashlahah al-mursalah adalah pertimbangan penetapan menuju maslahah yang harus didasarkan dan tidak bisa tidak.

d. Sadd al-Dzari'ah dan Fath al-Dzari'ah.

Sadd al-Dzari'ah adalah upaya pengendalian masyarakat menghindari kemafsadatan dan Fath al-Dzari'ah adalah upaya perekayasa masyarakat mencapai kemaslahatan.

Sadd al-Dzari'ah dan Fath al-Dzari'ah adalah "alat" dan bukan "tujuan", contohnya ialah pelaksanaan jam malam, larangan membawa senjata dan peraturan kependidikan. Pengendalian dan perekayasaan berdasar sadd al-dzari'ah dan fath al-dzari'ah dapat diubah atau dikuatkan sesuai situasi.

e. Al-'Adah

Kata Al-'Adah disebut juga Urf. Al-'Adah terdiri dua macam, yaitu: al-'adah ash sholihah yaitu adat yang tidak menyalahi syara' dan al-'adah al-fasidah yaitu adat yang bertentangan dengan syara'.

f. Al-Istihsan

Al-Istihsan secara sederhana dapat diartikan sebagai berpaling dari ketetapan dalil khusus kepada ketetapan dalam umum. Dengan kata lain berpindah menuju dalil yang lebih kuat atau membandingkan dalil dengan dalil lain dalam menetapkan hukum.

g. Kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah

Kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah adalah sebagai teori ulama yang banyak digunakan untuk melihat ketetapan pelaksanaan fiqh siyasah kaidah-kaidah itu bersifat umum. Oleh karena itu, dalam

penggunaannya, perlu memperhatikan kekecualian-kekecualian dan syarat-syarat tertentu.

### 3. Bidang –Bidang

Bidang-bidang Fiqh Siyasah Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqh siyasah, maka dalam tahap perkembangan fiqh siyasah ini, dikenal beberapa pembedangan fiqh siyasah. Tidak jarang pembedangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembedangan yang diajukan oleh ahli lain. Hasbi Ash Siddieqy, sebagai contoh, membaginya ke dalam delapan bidang, yaitu;

- 
- a. Siyasah Dusturriyah Syar'iyyah
  - b. Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah
  - c. Siyasah Qadha'iyyah Syar'iyyah
  - d. Siyasah Maliyah Syar'iyyah
  - e. Siyasah Idariyah Syar'iyyah
  - f. Siyasah Kharijiyah Syar'iyyah/Siyasah Dawliyah
  - g. Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyyah
  - h. Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah

Contoh lain dari pembedangan fiqh siyasah terlihat dari kurikulum fakultas syari'ah, yang membagi fiqh siyasah ke dalam empat bidang, yaitu:

- 1) Fiqh Dustury
- 2) Fiqh Dawly
- 3) Fiqh Maliy

#### 4) Fiqh Harbiy

Pembidangan-pembidangan di atas tidak selayaknya dipandang sebagai “pembidangan yang telah selesai”. Pembidangan fiqh siyasah telah, sedang dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antarmanusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan siyasah. Dalam fiqh tersebut, berkenaan dengan pola hubungan antarmanusia yang menuntut pengaturan siyasah, dibedakan:

- a. Fiqh siyasah dusturiyyah, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara. Jadi, permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Maka ruang lingkup pembahsannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Contoh Negara yang menganut siyasah dusturiyyah yaitu Negara Indonesia, Ira’ dan lain-lain. Misalnya: Membayar pajak tepat waktu, pembuatan identitas kewarga negaraan seperti pembuatan KTP, SIM, dan AKTA Kelahiran.
- b. Fiqh siyasah dawliyyah, Dauliyah bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang. Sedangkan Siyasah Dauliyah bermakna sebagai



kekuasaan Kepala Negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan Internasional, masalah territorial, nasionalitas ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Selain itu juga mengurus masalah kaum Dzimi, perbedaan agama, akad timbal balik dan sepihak dengan kaum Dzimi, hudud, dan qishash. Fiqh yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain. Contoh Negara yang menganut siyasah dauliyah yaitu Negara Iran, Malaysia, dan Pakistan. Meskipun tidak sepenuhnya penduduknya beragama Islam. misalnya. Misalnya: NATO PBB.

c. Fiqh siyasah maliyyah, fiqh yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara. Maka, dalam fiqh siyasah ada hubungan di antara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Dalam suatu kalangan rakyat, ada dua kelompok besar dalam suatu negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antar orang-orang kaya dan miskin. Fiqh siyasah ini, membicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok tersebut, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar. Adapun Negara yang menganut fiqh maliyyah adalah Semua Negara. Contohnya: RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan Negara).

d. Fiqh Siyasah Harbiyyah, siyasah yang mengatur tentang peperangan dan aspek –aspek yang berhubungan dengannya, seperti perdamaian.

Fiqh siyasah Harbiyyah ini meliputi pengertian dari fiqh harbiyyah itu sendiri serta tujuan dan macam-macam peperangan dalam islam, kaidah-kaidah peperangan dalam islam, masalah mobilisasi umum, hak-hak dan jaminana keamanan serta perlakuan dalam peperangan, tawanan perang, harta peperangan, dan mengakhiri peperangan melalui perdamaian.<sup>14</sup>

## **B. PRINSIP- PRINSIP SIYASAH**

### **1. Prinsip Ketatanegaraan Dalam Islam**

#### **a. Prinsip al-Musawah dan al-ikha (Persamaan dan Persaudaraan)**

Dalam sejarah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di Madinah, prinsip persamaan dan persaudaraan ini oleh nabi SAW dipraktekkan ketika ia menyusun piagam Madinah. Islam menganut prinsip persamaan dihadapan hukum dan penciptanya, yang menjadi pembedanya adalah kualitas ketaqwaan individu. Keberpihakan islam pada prinsip persaudaraan dan persamaan didasarkan pada tujuan yang hendak diraih yakni adanya pengakuan terhadap persaudaraan semesta dan saling menghargai diantara sesama umat manusia sehingga dapat tercipta kehidupan yang toleran dan damai. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 10

---

<sup>14</sup>*Ibid*, Dr. J. Suyuthi Pulungan, M.A. *Fiqh Siyasah Ajaran, sejarah dan pemikiran*, halm. 39-41

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥٦﴾

Artinya:

*Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena tu damaikanlah antara kedua saudramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kam mendapat rahmat.*<sup>15</sup>

b. Prinsip al-amanah (akuntabilitas)

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara , amanah merupakan amanah rakyat yang diberikan kepada seorang pemimpin untuk menjalankan roda pemerintah yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kontrak sosial. Bagi pengemban amanah harus mampu menjalankan titah rakyat sekaligus harus mampu menjadi pelayan rakyat dan wajib hukumnya untuk bersikap adil.

c. Prinsip at-Tasamuh (toleransi)

Sikap toleran merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap individu didalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena dalam suatu negara akan terdiri dari berbagai macam agama, suku, dan bangsa. Prinsip Toleransi berlaku universal, sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama warga negara bukan saja terhadap sesama orang islam, tetapi juga harus berlaku lintas agama dan suku.

---

<sup>15</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemanya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia , 2012), halm 516

d. Prinsip al-Huriyah (kebebasan)

Secara fitrah manusia sudah dibekali dengan daya intelektualitas dan kebebasan untuk memilih suatu keyakinan serta kebebasan untuk berpikir. Dalam islam prinsip kebebasan dalam menentukan suatu keyakinan atau memeluk suatu agama mendapatkan perhatian dalam Q.S al-Baqarah :256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ  
بِاللَّهِ فَقَدْ أَصْبَحَ عَلَى الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya:

*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*<sup>16</sup>

Kebebasan dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Kebebasan berfikir
- 2) Kebebasan beragama
- 3) Kebebasan menyampaikan pendapat
- 4) Kebebasan menuntut ilmu
- 5) Prinsip at-Tasyawur/ as-Syura (musyawarah)

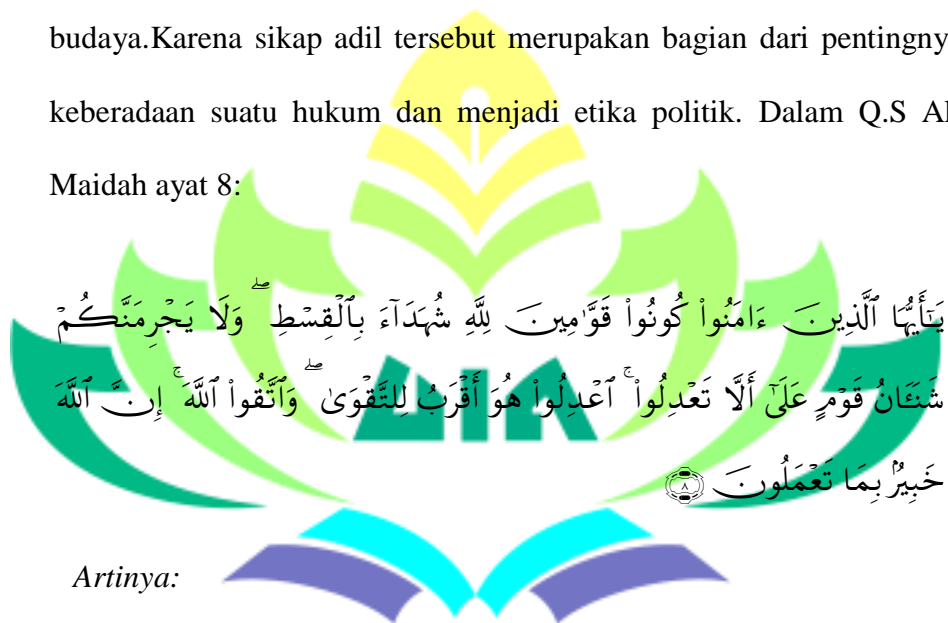
---

<sup>16</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemanya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia , 2012), halm 42

Prinsip musyawarah merupakan prinsip yang diajarkan oleh al-Qur'an dan nabi Muhammad yang dijadikan etika politik didalam kehidupan bernegara dan berbangsa yang menjadi media untuk mufakat apabila ada perselisihan pendapat.

e. Prinsip al-Adalah (keadilan, keseimbangan, dan moderasi)

Prinsip ini mengandung pengertian penegakan keadilan. Keadilan merupakan prinsip yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di bidang hukum, ekonomi, politik, dan budaya. Karena sikap adil tersebut merupakan bagian dari pentingnya keberadaan suatu hukum dan menjadi etika politik. Dalam Q.S Al-Maidah ayat 8:



Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.*

17

---

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemanya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia , 2012), halm 42

f. Prinsip al-Tha'ah (ketaatan)

Ketaatan adalah suatu hal yang sangat penting bagi tegaknya sebuah pemerintahan yang baik dan teratur. Tanpa adanya kepatuhan dan ketaatan dari seluruh elemen masyarakat dan juga penyelenggara negara, maka tidak akan terwujud negara dengan pemerintahan yang baik.<sup>18</sup>

Dasar hukum ketaatan dan kemaslahatan umat dalam Al-quran surat An-Nur ayat 49:

وَإِنْ يَكُنْ هُمْ الْآحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿٤٩﴾

Artinya:

*Tetapi jika Keputusan itu untuk (kemaslahatan) mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh.<sup>19</sup>*

## 2. Prinsip Dasar Dalam Politik Islam

Untuk menyelenggarakan pemerintahan negara, terdapat empat prinsip dasar dalam politik islam. Keempat prinsip itu adalah:

a. Prinsip amanat

Prinsip pertama mengandung makna bahwa kekuasaan politik yang dimiliki oleh pemerintahan merupakan amanat Allah dan juga

---

<sup>18</sup>Dr. J. Suyuthi Pulungan, M.A. *Fiqh Siyasah Ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta, Raja Wali Pers, 1993), halm. 1-12

<sup>19</sup>Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Jakarta: Departemen Agama, 1984), hal. 70

amanat rakyat yang telah mengangkatnya melalui baiat. Sebagaimana amanat Allah SWT, kekuasaan politik itu dianugerahkan oleh Allah SWT kepada manusia. Penganugerahan itu dilakukan melalui satu ikatan perjanjian. Perjanjian itu terjalin antara sang penguasa Allah di satu pihak, dan dengan masyarakat di pihak lain. Karena itu, prinsip ini menghendaki agar pemerintahan melaksanakan tugas-tugasnya dengan memenuhi hak-hak yang diatur dan dilindungi oleh hukum Allah, termasuk di dalamnya amanat yang dibebankan oleh agama dan yang dibebankan oleh individu dan masyarakat sehinggatercapai masyarakat yang sejahtera dan sentosa. Amanat yang dimaksud dengan banyak hal, salah satu di antaranya adil.

b. Prinsip keadilan

Adil menjadi prinsip kedua dalam pengelolaan kekuasaan politik. Keadilan yang dituntut itu bukan hanya terhadap kelompok, golongan, atau kaum muslim saja, tetapi mencakup seluruh manusia bahkan seluruh makhluk. Ayat-ayat al-Qur'an yang mencakup hal ini amat banyak, salah satunya berupa teguran kepada Nabi SAW yang hampir menvonis salah seorang Yahudi, karena terpengaruh oleh pembelaan keluarga seorang pencuri.<sup>20</sup> Dalam konteks inilah turun firman Allah dalam Q.S an-Nisa':105.

---

<sup>20</sup>*Op. cit* halm 6



إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ لِنَتَحَكَّمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ  
لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿١٥﴾

Artinya:

*Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat.<sup>21</sup>*

Keadilan juga mengandung arti bahwa pemerintahan berkewajiban mengatur masyarakat dengan membuat aturan-aturan hukum yang adil berkenaan dengan masalah-masalah yang tidak beraturan secara rinci atau didiamkan oleh hukum Allah. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan berjalan di atas hukum dan bukan atas dasar kehendak pemerintahan atau pejabat.

#### c. Prinsip ketaatan

Prinsip ketaatan mengandung makna wajibnya hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan sunnah ditaati. Demikian pula hukum perundang-undangan dan kewajiban pemerintahan wajib ditaati. Kewajiban ini tidak hanya dibebankan kepada rakyat, tetapi juga dibebankan kepada pemerintahan. Oleh karena itu, hukum perundang-undangan dan kebijakan politik yang diambil pemerintahan harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum agama. Jika tidak

---

<sup>21</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemanya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), halm 95

demikian, maka kewajiban rakyat kepada hukum dan kebijakan dinyatakan telah gugur, karena agama melarang ketaatan pada kemaksiaatan. Rakyat harus menaati pemerintah selama pemerintahan itu menaati Allah SWT dan rasul-Nya.<sup>22</sup>

Menurut Quraish Shihab (1999, 427), “Tidak disebutkan kata perintah taat pada *ulil amri* untuk memberi isyarat bahwa ketaatan kepada mereka tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan atau bersyarat dengan ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya

d. Prinsip musyawarah

Prinsip musyawarah menghendaki agar hukum perundang-undangan dan kebijakan politik diterapkan melalui musyawarah di antara mereka yang berhak. Masalah yang diperselisihkan para peserta musyawarah harus diselesaikan dengan menggunakan ajaran-ajaran dan cara-cara yang terkandung dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul Allah SAW. Prinsip musyawarah ini diperlukan agar para penyelenggara negara dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertukar pikiran dengan siapa saja yang dianggap tepat guna mencapai yang terbaik untuk semua.<sup>23</sup> Q.S Ali Imran ayat 159

---

<sup>22</sup>Dr. J. Suyuthi Pulungan, M.A. *Fiqh Siyasa Ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta, Raja Wali Pers, 1993), halm. 17

<sup>23</sup>*Ibid.*, Halm 19

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ  
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ  
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

#### Artinya

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka.sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah.Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.<sup>24</sup>

Adapun cita-cita politik Islam-seperti dikemukakan secara implisit oleh al-Qur'an-adalah:

- 1) Terwujudnya sebuah sistem politik
- 2) Berlakunya hukum Islam dalam masyarakat
- 3) Terwujudnya ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

Cita-cita politik tersebut tersimpul dalam ungkapan “*baladun thayibbatun wa rabbun ghafur*”, yang mengandung konsep “negeri sejahtera dan sentosa. Dari sini tampak kedudukan kekuasaan politik sebagai sarana dan wahana, sedangkan pemerintahan merupakan pelakasa bagi tegaknya ajaran agama.

<sup>24</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemanya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia , 2012), halm 71

### C. SIYASAH DALAM PENEGAKAN HUKUM

Al-Qur'an mengandung seperangkat tata nilai etika dan hukum bernegara yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Bentuk dan sistem negara diserahkan kepada manusia untuk menetapkan dan mengaturnya. Al-Qur'an tidak menentukan suatu bentuk negara tertentu atau suatu sistem yang baku tentang negara dan pemerintahan, yang penting seperangkat tata nilai etika dan hukum dalam al-Qur'an itu dijadikan pedoman dalam mengatur negara. Dengan demikian, ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan pemerintahan dan negara dapat menampung perkembangan zaman dan dinamika masyarakat.

Seperangkat nilai tersebut berupa prinsip-prinsip yang memiliki kelenturan dalam penerapannya. Prinsip-prinsip itu, secara elastis, dapat diterapkan di tengah perbedaan kondisi, situasi, zaman, budaya dan lain-lain. Setiap kelompok manusia mempunyai kebebasan dalam menterjemahkan dan merinci serta menerapkan nilai dasar itu.

Untuk kesempurnaan amanat dan hukum yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, diperintahkan untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya serta pemerintah. Firman Allah Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*<sup>25</sup>

Ada tiga katagori hukum yang berlaku dalam pergaulan masyarakat Islam.

1. Syari'at yaitu keetentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan subyek hukum, berupa melakukan suatu perbuatan, memilih atau menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab atau penghalang. Syari'at bersifat tetap, tidak berubah dan seharusnya tidak terdapat perbedaan pendapat.
2. Fiqh adalah pemahaman tentang hukum-hukum syara yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci. Fiqh adalah hasil kemampuan intelektualitas (Ijtihad) ulama terhadap dalil-dalil hukum yang terdapat pada Al-Qur'an dan Hadis, yang selalu berkembang dan selalu terdapat perbedaan pendapat.
3. Siyasah syari'ah adalah kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang dikehendaki oleh kemaslahantan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun tidak adil ada dalil tertentu. Siyasah syari'ah lebih terbuka dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan zaman berpengaruh

---

<sup>25</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemanya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia , 2012), halm 87

besar terhadap siyasah syari'ah. Persoalan kapan nilai-nilai etika dan hukum yang terdapat pada syari'at, fiqh dan siyasah syari'ah diberlakukan di Indonesia. Sedangkan sistem hukum Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental yang menganut aliran legisme, yang memandang hukum adalah suatu kepastian dan tertulis dalam bentuk UU atau PP, walaupun dalam UU No. 14 Tahun 1970 memberikan peluang untuk sistem hukum Islam dan adat dapat diberlakukan. Namun, itu tidak mudah tergantung pada politik hukum yang dianut oleh suatu kekuasaan.<sup>26</sup>

Prospek Hukum Islam di Indonesia rakyat Indonesia adalah mayoritas beragama Islam, dapatkah berkehendak untuk memberlakukan nilai-nilai etika dan hukum Islam dalam praktik kenegaraan. Penegakan supremasi hukum untuk memberantas korupsi<sup>27</sup> berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) secara universal mengalami degradasi. Kondisi tersebut, antara lain disebabkan banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pada masa lalu tidak mencerminkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan yang bersendikan hukum agama dan hukum adat. Substansi hukum yang tidak mencerminkan nilai-nilai etika dan hukum masyarakat

---

<sup>26</sup>Dr. J. Suyuthi Pulungan, M.A. *Fiqh Siyasah Ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta, Raja Wali Pers, 1993), halm. 40-41

<sup>27</sup> Jurnal Al Addalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

pemberlakuannya kurang efektif, bahkan sikap otoriter pemerintah untuk memaksakan hukum itu berlaku (teori kekuasaan).<sup>28</sup>

Padahal secara ideal hukum itu akan diterima, apabila substansi hukum merupakan adopsi dari nilai-nilai hukum yang dianut oleh masyarakat. Umat Islam sebagai penduduk yang mayoritas di Indonesia, hukum Islam sangat memiliki peluang yang besar berkontribusi nilai-nilai hukumnya terhadap hukum nasional.

Berdasarkan teori lingkaran yang menunjukkan betapa eratny hubungan agama, hukum dan negara. Karena itu, dengan penduduk yang mayoritas Islam, tentu hal tersebut dapat dijadikan parameter bagaimana negara Indonesia dalam pembangunan hukum di masa depan. Dengan demikian, pendapat yang memisahkan agama dengan negara adalah bertentangan dengan nilai-nilai sunatullah (hukum alam). Sebagai negara berdasarkan atas hukum yang berfalsafat pancasila melindungi agama dan memberikan jaminan untuk umat beragama, menjalankan syari'at agamanya, bahkan berusaha untuk memasukan ajaran dan hukum agama Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti pernyataan proklamator Mohammad Hatta, bahwa peraturan negara hukum RI, syari'at Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dapat dijadikan peraturan perundang-undangan

---

<sup>28</sup> Daud Ali, Mohammad, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. IV Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000



Indonesia sehingga orang Islam mempunyai sistem syari'at yang sesuai dengan kondisi Indonesia.<sup>29</sup>

Hukum Islam masih berada pada tatanan cita-cita (ius cosntituendum) belum berada pada tatanan aplikasi sebagai hukum positif (ius costitutum). Agar nilai-nilai etika dan hukum Islam berlaku dalam masyarakat, maka nilai-nilai etika dan hukum Islam itu harus dituangkan dalam bentuk UU.

Dalam suatu sistem pemerintahan yang menganut oposisi terbuka, apabila eksekutif menguasai juga legislatif, tentunya setiap kebijaksanaan akan diamankan oleh legislatif, padahal untuk menjaga keseimbangan perlu pengawasan dari legislatif terhadap eksekutif, berarti membutuhkan di legislatif keseimbangan antara partai pemerintah dengan partai yang oposisi. Keadaan ini dikuartirkan akan terjadi tarik menarik antara kepentingan politik penguasa dan kepentingan umat Islam. Seperti pada masa sebelumnya, ada dua hal yang menciptakan perbedaan kepentingan tersebut. Pertama, motivasi pilitik pemerintah legal policy yang mengedepankan nilai-nilai sekuler, dengan dalih hukum Islam tidak revelan dengan kondisi sosial serta pertimbangan pluralisme yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Sehingga segala kebijakan politik hukum dibentuk dan diarahkan kepada pengurangan peran hukum agama. Kedua, umat Islam mempersepsikan bahwa hukum Islam dan lembaga pendidikan adalah

---

<sup>29</sup> Suny, Ismail, *Hukum Islam Dalam Hukum Nasional*, Jakarta: Unismu Jakarta, 1987

bagian dari kewajiban agama (panggilan syar'i) yang mesti dan wajib kifayah untuk dilaksanakan dan dipertahankan. Pengabaian terhadap hukum Islam dan lembaganya, sama saja halnya pengabaian dan durhaka pada hukum-hukum Allah. Oleh sebab itu, dengan segala daya dan upaya wajib dijalankan dan dipertahankan. Namun, yang sering menjadi pemenang dalam konteks pergumulan tersebut adalah pihak penguasa karena didukung oleh kekuatan-kekuatan pemaksa. Hal ini dapat dibuktikan dengan setiap produk hukum yang dalamnya mengandung nilai-nilai hukum Islam, selamanya mendapat tantangan dikalangan yang kelompok tidak menginginkan hukum Islam diberlakukan. Bahkan terlibat polemik baik secara nasional maupun internasional.

Ada empat peluang untuk diberlakukan hukum Islam sebagai hukum nasional.

- a. Hukum Islam yang disebutkan dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat berlaku langsung tanpa harus melalui hukum adat.
- b. Republik Indonesia dapat mengatur suatu masalah sesuai dengan hukum Islam, sepanjang pengaturan itu hanya berlaku bagi umat Islam.
- c. Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia adalah sama dan sederajat dengan hukum adat dan hukum barat.

- d. Hukum Islam juga menjadi sumber hukum pembentukan hukum nasional akan datang disamping hukum adat, hukum barat dan hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam negara Indonesia. Disamping empat peluang tersebut, peluang yang sangat menentukan keberlakuan hukum Islam secara nasional adalah keputusan-keputusan hakim peradilan agama atau keputusan hakim selain peradilan agama yang menjadikan hukum Islam sebagai dasar putusannya.



### BAB III

#### TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

##### A. Latar Belakang lahirnya

Usaha untuk memberantas kejahatan korupsi merupakan masalah yang tidak mudah, pembaharu besar *cina Wang Shich* (1021-1066) dalam usahanya memberantas korupsi terkesan oleh dua sumber yang senantiasa berulang-ulang, yaitu: Buruknya hukum dan buruknya manusia.

Sejak lama masyarakat dibuat jengah jika berbicara seputar korupsi. Di satu sisi, korupsi sering dijadikan bahan pembicaraan dan berita utama di media masa, namun pada sisi lain, jangankan penyelesaiannya, kalanjutannya pun kadang tidak jelas. Sebagian masyarakat berharap pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara cepat dan tuntas, terutama terhadap koruptor-koruptor besar (*grand corruption*). Masyarakat seperti tidak sabar dan memandang mudah penuntasan kasus-kasus korupsi, karena memang telah sekian lama dikecewakan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum.<sup>30</sup>

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi

---

<sup>30</sup>Eggi Sudjana, *Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati*, Surabaya: JP BOOKS, 2008, hlm 203

kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.<sup>31</sup>

Pola perkembangan kejahatan korupsi termasuk golongan kejahatan yang pengembangannya mempunyai potensi tinggi yang sulit untuk dijangkau rumusan hukum dan pertumbuhannya, meningkatkan kemungkinan pola kejahatan menjadi semakin relatif. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.<sup>32</sup>

Pada perkembangannya, korupsi tetap pada satu pertanyaan besar, bahwa korupsi memang tidak mungkin diberantas. Realitas masih menunjukkan bagaimana penegakan hukum seakan mandeg menghadapi korupsi. Padahal dari sisi aturan dan kelembagaan sudah memadai dan bahkan terus diperbaharui. Indikasi terbang pilih, adanya benturan kepentingan sehingga melahirkan cukongisasi korupsi yang luar biasa, atau pengambilan aset hasil korupsi yang menghilangkan aspek hukum koruptor tentunya bukan tontonan baru bagaimana korupsi itu sulit untuk diberantas.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai

---

<sup>31</sup>Achmad Fauzan, *Perundang-undangan Lengkap tentang peradilan Umum, Peradilan Khusus, Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan Korupsi, Pengadilan Perburuan (UU No. 2 Th. 2004), Pengadilan Pajak, Mahkamah Syariah, Mahkamah Pelayaran (plus PP No. 8 Th. 2004)*, dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: 2005, hlm. 200

<sup>32</sup>Achmad Fauzan, *loc. cit*

hambatan, untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, profesional, serta berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain dalam penetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>33</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Taun 2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut komisi pemberantasan korupsi, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan

---

<sup>33</sup> Ahmad Fauzan, *op., cit.*, hlm. 200-201

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggung jawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan Undang-undang.

Undang-undang ini dibentuk berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Undang-undang tersebut. Pada saat sekarang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh karena itu pengaturan kewenangan Komisi Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-undang ini dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi tumpang-tindih kewenangan dengan berbagai instansi tersebut.

Landasan Yuridis-Normatif tidak Berwenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dalam Menangani Masalah Korupsi, Berbagai rasa ketidakadilan sebagai dampak dari korupsi telah menyentuh langsung bagaimana berbagai kesempatan yang telah digariskan dalam undang-undang utamanya wujud pemerataan kekayaan alam, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan menjadi sulit diterima oleh masyarakat miskin. Bahkan UUD 1945 pun sudah menegaskan bahwa korupsi yang merugikan hak asasi sosial dan ekonomi adalah kejahatan luar biasa dan musuh bersama masyarakat dan bangsa



Indonesia. Namun, mengapa keberadaannya seperti sesuatu yang tak terelakkan dan dibutuhkan.<sup>34</sup>

Pada masa orde lama, Korupsi belum dianggap sebagai ancaman negara yang membahayakan. Tahun 1956, kasus korupsi mulai menguat dengan diangkatnya kasus korupsi di media cetak oleh Muchtar Lubis dan Rosihan Anwar, namun keduanya malah dipenjara (1961), adapun dasar hukum yang digunakan pada waktu itu adalah KUHP terkait dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai negeri (ambtenaar), yaitu pada Bab XXVIII Buku Kedua KUHP.<sup>35</sup>

Dilihat dari latar belakang sosial politik yang mendorong terbentuknya undang-undang ini, bahwa fakta sejarah menunjukkan pada tahun 1965 di Indonesia terjadi tragedi nasional yaitu pemberontakan G 30 S/PKI yang kemudian melahirkan orde baru. Semangat pemerintah orde baru untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagai salah satu perwujudan dari pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Karena dianggap belum mampu mencegah dan memberantas korupsi, maka terjadilah demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan pelajar. Maka pemerintah merespon tuntutan tersebut dengan mengganti peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi yang

---

<sup>34</sup>Eggi Sudjana, *op. cit.*, hlm. V

<sup>35</sup><http://images.suryama.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/R1jtagoKCtUAAHiAnIU1/KPK.pdf?nmid=63022630>

baru, yaitu Undang-undang Nomor 3 tahun 1971.undang-undang ini bertahan sampai tahun 1999.<sup>36</sup>

Pada tahun 1999 – sampai sekarang, dasar hukum yang digunakan dalam memberantas tindak pidana korupsi menggunakan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.Menyempurnakan kembali perumusan tindak pidana korupsi dalam UU 3/1971 (korupsi aktif dan korupsi pasif) Penegasan perumusan tindak pidana korupsi dengan delik formil, memperluas pengertian pegawai negeri, dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/TGTPK (PP 19/2000), KPK (UU 30/2002).<sup>37</sup>

Karena begitu peliknya masalah pemberantasan korupsi di negeri ini, KPK sebagai lembaga yang berwenang menangani tindak pidana korupsi tidak diberi wewenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan, yang mana ketentuan ini tidak pernah diberikan pada lembaga selain KPK. Adapun dasar hukumnya adalah pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 40 “Komisi pemberantasan korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi”.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>Agnes Widiyanti S, Dkk, *op., cit.*, hlm. 106-107

<sup>37</sup><http://images.suryama.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/R1jtagoKCtUAAHiAnIU1/KPK.pdf?nmid=63022630>

<sup>38</sup>Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, UU No. 30/2002, UU No. 20/2001, UU No. 31/1999, UU No. 28/1999, UU No. 3/1999, PP No. 71/2000, *Organisasi dan*

Dengan demikian landasan yuridis-normatif tidak Berwenangnya KPK Mengeluarkan SP3 dalam Menangani Masalah Korupsi adalah pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Keberadaan Undang-undang No. 30 tahun 2002 merupakan salah satu norma hukum yang ada, maka secara implisit di dalam undang-undang tersebut khususnya Pasal 40 terdapat nilai-nilai luhur. Karena norma hukum itu sendiri merupakan konkritisasi dari nilai-nilai luhur yang abstrak, yang hidup dalam masyarakat sebagai pedoman dalam bertindak laku.

Adanya ketentuan pasal 40 UU No.30 Tahun 2002 tampaknya ada sesuatu yang akan dibenahi pada sistem penegakan hukum di Indonesia, tentu kita tahu bagaimana menderitanya bangsa ini karena ulah koruptor, dari masa pra-kemerdekaan, orde lama, orde baru sampai sekarang, koruptor tidak pernah berhenti menjarah uang rakyat. Lembaga hukum yang bertugas menanganinya pun tak bisa berbuat apa-apa, seakan hanya menonton menyaksikan hal tersebut. Maka karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang bertugas menangani korupsi, dengan adanya pasal 40 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 ini diharapkan nantinya dapat menahan laju korupsi yang ada di negeri ini,

sehingga bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang bermartabat dan juga maju.

## **B. Tugas Dan Wewenang**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari intervensi kekuasaan manapun.

KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai trigger mechanism, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

Adapun tugas KPK yang adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK); supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK; melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

1. Dalam melaksanakan tugasnya KPK mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam pasal 6 yaitu:

Pasal 6:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.<sup>39</sup>

2. Dalam melaksanakan tugasnya KPK mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 5 yaitu:

Pasal 5:

- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;

---

<sup>39</sup>Undang-undang no 30 tahun 2002 tentang KPK, (Yogyakarta: Pustaka mahardika,2016, halm. 5

- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.<sup>40</sup>

### C. Pimpinan KPK

Pimpinan KPK adalah pejabat negara yang terdiri dari 5 (lima) anggota yakni Ketua yang merangkap Anggota, serta Wakil Ketua yang terdiri atas 4 (empat) orang dan masing-masing merangkap Anggota.

Ketua KPK adalah salah satu dari lima pimpinan di KPK. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi juga merangkap sebagai anggota KPK.

Wakil Ketua KPK merupakan pimpinan KPK yang juga merangkap sebagai anggota KPK. Wakil Ketua KPK terdiri dari:

1. Wakil Ketua Bidang Pencegahan;
2. Wakil Ketua Bidang Penindakan;
3. Wakil Ketua Bidang Informasi dan Data; dan
4. Wakil Ketua Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat

Tim Penasihat berfungsi memberikan nasihat dan pertimbangan sesuai dengan kepakarannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Tim Penasihat yang terdiri dari 4 (empat) anggota.

---

<sup>40</sup>Undang-undang no 30 tahun 2002 tentang KPK, (Yogyakarta: Pustaka mahardika, 2016, halm. 5-6

Pelaksana Tugas Berdasarkan Lampiran Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi No. PER-08/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK, pelaksana tugas KPK terdiri dari:

1. Deputi Bidang Pencegahan
2. Deputi Bidang Penindakan
3. Deputi Bidang Informasi dan Data
4. Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat
5. Sekretariat Jenderal

#### **D. Pasal 40 tentang Penghentian Penyidikan**

Pemeriksaan suatu perkara dilakukan oleh penyidik. Menurut pasal 1 ayat 1 KUHAP dinyatakan bahwa penyidik ialah polisi atau pejabat pegawai sipil yang diberi tugas oleh Undang-undang ini untuk menyelidiki.<sup>41</sup> Proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik kalau tersangka yang diberitahu melalui suatu panggilan kepolisian mau menghadap secara baik-baik. Tetapi seringkali etiket baik seseorang yang dicurigai melakukan tindak pidana itu tidak ada. Terhadap yang terakhir ini perlu dilakukan penangkapan.<sup>42</sup> Menurut pasal 16 ayat 1 dan 2 KUHAP dinyatakan bahwa penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan penyidik atas perintah penyidik dan penyidik pembantu.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>KUHP dan KUHAP, Bandung: Citra Media Wacana, 2009, hlm. 198

<sup>42</sup>R. Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, Cet. 2, 1990, hlm. 201-202

<sup>43</sup>KUHAP dan KUHAP, *op. cit.*, hlm 206

Suatu penahanan dapat dilakukan berdasarkan dugaan dan bukti yang cukup bahwa seseorang telah melakukan tindakan pidana tertentu. Bila ternyata kesalahan tertuduh itu tidak dapat atau mungkin dapat dibuktikan tetapi belum cukup meyakinkan apakah ia betul-betul melakukannya atau tidak, maka dalam menanggapi keadaan seperti ini hakim harus membebaskan tertuduh dari tuduhan yang meragukan tersebut, jadi dengan kata lain demi menjamin atas hak asasi seseorang tidak bersalah itu (dalam hal ini kemerdekaan) tidak terlepas, setiap orang (tersangka) yang belum tentu salah dianggap tidak pernah melakukan peristiwa pidana meskipun ia mungkin telah melakukannya.<sup>44</sup>

Penuntutan merupakan tindakan berlanjut setelah selesai penyidikan dan tidak ada alasan penghentian penyidikan karena kurang bukti (yang biasanya dengan dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan (SP3)) atau bukan perbuatan pidana, atau penghentian penuntutan demi kepentingan hukum.<sup>45</sup>

Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang dimulainya. Hal ini ditegaskan

Pasal 109 ayat 2 :

---

<sup>44</sup>Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, hlm. 25-26

<sup>45</sup>Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Gajah Mada, Cet. II, 1988, hlm. 22



Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.<sup>46</sup>

Rasio atau alasan pemberian wewenang penghentian ini, antara lain:

1. Untuk menegakkan prinsip peradilan cepat, tepat dan biaya ringan, dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat, jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyelidikan atau penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka dimuka persidangan untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan. Agar tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat.
2. Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, sebab kalau perkara diteruskan, tapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/ terdakwa untuk menuntut ganti kerugian.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Undang-undang no 30 tahun 2002 tentang KPK, (Yogyakarta: Pustaka mahardika, 2016, halm. 90

<sup>47</sup> Yahya Harahap, *op. cit*, hlm 150

Adapun alasan penghentian penyidikan, Undang-undang telah menyebutkan secara limitatif alasan yang dapat dipergunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan.<sup>48</sup> Alasan penghentian yang disebut pada pasal 109 ayat 2.

Pasal 109 ayat 2:

- a. Tidak diperoleh bukti yang cukup Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan pengadilan. Atas dasar kesimpulan ketidakcukupan bukti inilah penyidik berwenang menghentikan penyidikan. Ditinjau dari satu segi, pemberian wewenang ini membina sikap mental penyidik untuk tidak secara serampangan mengajukan begitu saja segala hasil penyidikan yang telah dilakukannya
- b. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana. Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pelanggaran dan kejahatan, dalam hal ini berwenang menghentikan penyidikan. atau tegasnya, jika apa yang disangkakan bukan kejahatan maupun pelanggaran pidana yang

---

<sup>48</sup>Penyebutan dan penggarisan alasan-alasan tersebut penting, guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan ini, undang-undang mengharapkan supaya di dalam mempergunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujinya kepada alasan-alasan yang telah ditentukan. *Ibid*, hlm. 150

termasuk kompetensi peradilan umum, jadi tidak merupakan pelanggaran dan kejahatan seperti yang diatur dalam KUHP atau dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus yang termasuk dalam ruang lingkup wewenang peradilan umum, penyidikan beralasan dihentikan.

- c. Penghentian penyidikan demi hukum. Penghentian atas dasar alasan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Bab VIII KUHP, sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan pasal 76,77,78, dan seterusnya, antara lain:

- 1) *Nebis in idem* (pasal 76 KUHP), seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap mana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia, serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Tersangka meninggal dunia (pasal 77 KUHP), dengan meninggalnya tersangka, dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan.<sup>49</sup>
- 3) Karena kadaluwarsa, seperti yang dijelaskan dalam pasal 78 KUHP. Apabila telah dipenuhi tenggang waktu penuntutan

---

<sup>49</sup>Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal pada abad modern, yakni kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan. *Ibid*, hlm 153

seperti yang diatur dalam pasal 78 KUHP, dengan sendirinya menurut hukum penuntutan terhadap pelaku tindak pidana tidak boleh lagi dilakukan.<sup>50</sup>

Sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang (pasal 109 ayat 2), apabila penyidikan dihentikan, maka penyidik berkewajiban memberitahukan hal tersebut, ada 2 ketentuan perihal pemberitahuan ini, yaitu:<sup>51</sup>

a) Jika yang melakukan penghentian penyidikan itu penyidik Polri, pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan kepada:

- (1) Penuntut umum, dan
- (2) Tersangka atau keluarganya.

b) Jika penghentian penyidikan dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, pemberitahuan penghentian penyidikan harus segera disampaikan pada:

- (1) Penyidik Polri, sebagai pejabat yang berwenang melakukan koordinasi atas penyidikan, dan
- (2) Penuntut Umum untuk pemberitahuan penyidikan juga meliputi pemberitahuan kepada:
  - (a) Penasihat hukumnya, dan
  - (b) Saksi pelapor atau korban

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 151-153

<sup>51</sup>Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 153-154

Pemberitahuan pemberhentian penyidikan adalah merupakan suatu kewajiban, ditinjau dari segi saling adanya pengawasan horizontal baik antara sesama instansi aparat penegak hukum (dalam hal ini pihak penuntut umum) maupun pengawasan horizontal dari pihak luar (dalam hal ini tersangka atau keluarganya). Adapun cara pemberitahuan penghentian penyidikan sebaiknya berbentuk tertulis dan apabila penghentian penyidikan itu dilakukan penyidik pegawai negeri sipil, tata cara pemberituannya berpedoman kepada penjelasan pasal 109 KUHP, yakni pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan melalui penyidik Polri.

Karena begitu peliknya masalah pemberantasan korupsi di negeri ini, KPK sebagai lembaga yang berwenang menangani tindak pidana korupsi tidak diberi wewenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan, yang mana ketentuan ini tidak pernah diberikan pada lembaga selain KPK.

Pasal 40:

“Komisi pemberantasan korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi”.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Undang-undang no 30 tahun 2002 tentang KPK, (Yogyakarta: Pustaka mahardika, 2016, halm. 15

Dengan demikian landasan yuridis-normatif tidak berwenangnya KPK mengeluarkan SP3 dalam menangani masalah korupsi adalah pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Keberadaan Undang-undang No. 30 tahun 2002 merupakan salah satu norma hukum yang ada, maka secara implisit di dalam undang-undang tersebut khususnya Pasal 40 terdapat nilai-nilai luhur. Karena norma hukum itu sendiri merupakan konkritisasi dari nilai-nilai luhur yang abstrak, yang hidup dalam masyarakat sebagai pedoman dalam bertingkah laku.

Adanya ketentuan pasal 40 UU No.30 Tahun 2002 tampaknya ada sesuatu yang akan dibenahi pada sistem penegakan hukum di Indonesia, tentu kita tahu bagaimana penderitaaan bangsa ini karena ulah koruptor, dari masa pra-kemerdekaan, orde lama, orde baru sampai sekarang, koruptor tidak pernah berhenti menjarah uang rakyat. Lembaga hukum yang bertugas menanganinya pun tak bisa berbuat apa-apa, seakan hanya menonton menyaksikan hal tersebut. Maka karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang bertugas menangani korupsi, dengan adanya pasal 40 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 ini diharapkan nantinya dapat menahan laju korupsi yang ada di negeri ini, sehingga bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang bermartabat dan juga maju.

## E. Dampak Korupsi Dalam Kehidupan Bangsa

Secara harfiah, pengertian korupsi dapat berarti: Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran atau perbuatan yang buruk seperti pengelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.

Menurut *Transparency International* mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi. Dalam definisi tersebut terdapat tiga unsur, yaitu:

1. Menyalah gunakan kekuasaan adalah memanfaatkan keadaan yang strategis untuk keuntungan pribadi atau kelompok.
2. Kekuasaan yang dipercayakan (baik dalam sektor publik maupun swasta).
3. Keuntungan pribadi (dalam konteks ini, pribadi dapat pula dimaksudkan kepada keluarga atau teman-temannya).<sup>53</sup>

Dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 mendefinisikan tindak pidana korupsi di dalam Pasal 2 dan 3, yaitu:

Pasal 2 ayat 1:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan bahaya Laten Korupsi Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), cet I, hal 15

Pasal 3:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>55</sup>

Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatas namakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman.

Tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk mencakup pemerasan, penyuapan dan gratifikasi pada dasarnya telah terjadi sejak lama dengan pelaku mulai dari pejabat negara sampai pegawai yang paling rendah. Korupsi pada hakekatnya berawal dari suatu kebiasaan (habit) yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu ataupun yang lain dan pada akhirnya kebiasaan tersebut lama-lama akan menjadi bibit korupsi yang nyata dan dapat merugikan keuangan negara.

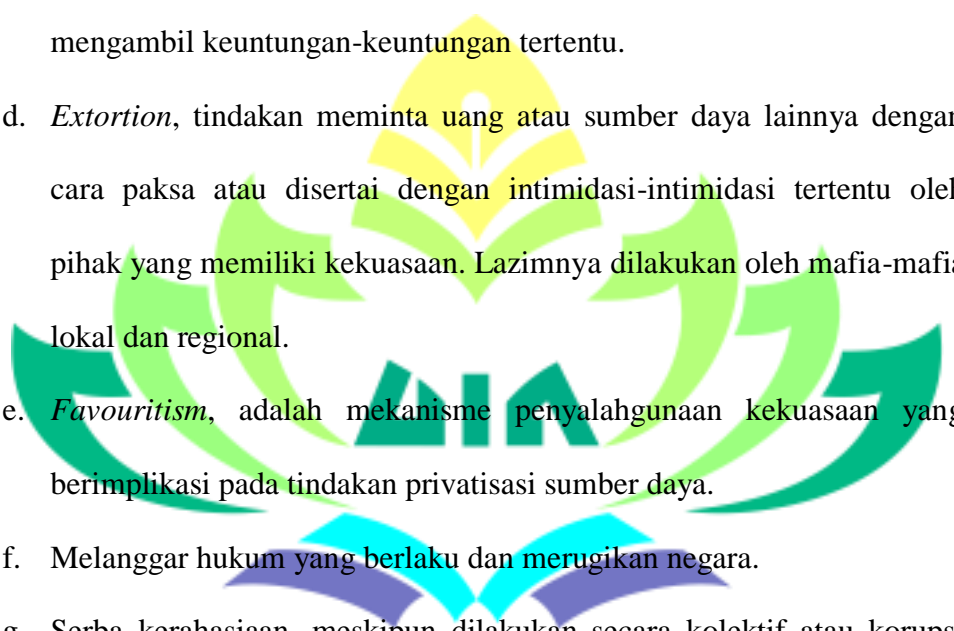
Beberapa bentuk korupsi diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>54</sup> Undang-undang no 30 tahun 2002 tentang KPK, (Yogyakarta: Pustaka mahardika,2016, halm. 6

<sup>55</sup> Undang-undang no 30 tahun 2002 tentang KPK, (Yogyakarta: Pustaka mahardika,2016, halm. 5



- 
- a. Penyuapan(*bribery*) mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang.
  - b. *Embezzlement*, merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu.
  - c. *Fraud*, merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan (*trickery or swindle*). Termasuk didalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan-keuntungan tertentu.
  - d. *Extortion*, tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi-intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal dan regional.
  - e. *Favouritism*, adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya.
  - f. Melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara.
  - g. Serba kerahasiaan, meskipun dilakukan secara kolektif atau korupsi berjamaah.<sup>56</sup>

Korupsi dapat diibaratkan sebagai penyakit menular yang memiliki dampak sangat buruk terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

---

<sup>56</sup> Anwar, bentuk korupsi(Jakarta: CV Pustaka setia, 2006) halm 18

Dampak buruk yang terkandung dalam perbuatan yang dapat didefinisikan sebagai segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dengan tujuan untuk memperkaya diri atau kalangan sendiri yang sangat dirahasiakan terhadap pihak-pihak lain di luar kalangan sendiri itu<sup>57</sup>, dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:

Dalam perspektif ekonomi ada beberapa dampak korupsi yang bisa diajukan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Terjadinya inefisiensi hingga menyebabkan biaya tinggi ekonomi, akhirnya beban keseluruhan itu biasanya harus ditanggung oleh konsumen.
- 2) Terjadinya eksploitasi dan ketidakadilan distribusi pada sumber daya dan dana pembangunan, karena hanya elit kekuasaan dan para pemilik modal saja yang bisa mengaksesnya.
- 3) Terjadinya inefektifitas dan inefisiensi pada birokrasi pemerintahan karena insentif menyebabkan watak birokrasi pemerintahan tidak efektif. Mereka tidak punya sensitifitas untuk melayani kepentingan publik dan selalu mencari rente bagi kepentingan sendiri atas kewajiban yang seharusnya dilakukan. Pada akhirnya, insentif ini akan berujung pada inefisiensi dan perubahan watak pelayanan birokrasi.
- 4) Terjadinya penurunan tingkat investasi modal sehingga pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pemasukan

---

<sup>57</sup>Revrison Baswir, "Strategi Memerangi Korupsi", artikel ini dikases pada 20 November 2017 dari <http://www.republika.co.id>.

negara. Akibat lebih lanjut, investor banyak yang tidak tertarik menanamkan modalnya di negara yang angka korupsinya tinggi.

Korupsi menyebabkan ketidakpastian berusaha yang secara diametral bertentangan dengan prinsip bisnis yang menginginkan kepastian dalam berusaha. Dampak langsung dari uraian di atas, pertumbuhan ekonomi akan stagnan dan kemiskinan menjadi kian absolute serta meluas.

Dalam konteks sosial, dampak korupsi menimbulkan problematik yang sangat besar. Yang jelas, korupsi berdampak pada merosotnya investasi pada *human capital* dan bahkan korupsi menghancurkannya. Ketiadaan pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan menyebabkan masyarakat rentan terhadap berbagai penyakit dan rendah kompetensinya sehingga masyarakat menjadi tidak profesional dan tidak mampu berkompetisi secara dinamis dengan berbagai sumberdaya manusia dari negara lain. Masyarakat juga menjadi kian permisif pada tindak korupsi. Korupsi dianggap sebagai suatu kelaziman dan bahkan menjadi pelumas bagi proses-proses ekonomi dan politik. Sikap dan perilaku kolusif dan koruptif itu pada akhirnya akan meniadakan etos kompetisi secara sehat, makin memperkuat hubungan patron-client, siapa yang berkuasa dan mempunyai uang bisa mengatur segalanya, kesenjangan antar kelompok sosial kian melebar dan melembaga sehingga menciptakan kerawanan sosial. Rusaknya mutu infrastruktur transportasi dan komunikasi tidak hanya menyebabkan mobilitas penduduk menjadi merosot, tetapi juga potensial menyebabkan

kerawanan sosial lainnya. Begitu juga dengan angka kemiskinan yang kian meningkat karena macetnya pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh luas pada stabilitas sosial dan politik.

Sedangkan pada bidang politik, terjadinya distorsi kepentingan pada lembaga politik tempat proses legislasi berlangsung. Karena para wakil rakyat yang dipilih melalui proses pemilu yang tidak sepenuhnya jujur, adil dan sikap koruptif menjadi bagian tak terpisahkan di dalamnya. Karena itu, elit dan lembaga politik punya kecenderungan mengabaikan aspirasi rakyat dan konstituennya. Dalam konteks ini, menarik untuk memperhatikan sinyalemen yang diajukan *ICW (Indonesia Corruption Word)*, kini tengah terjadi korupsi oligarki ke korupsi multipartai dan situasi ini menjadi faktor penghambat utama proses reformasi untuk keluar dari krisis multidemensi. Fakta di atas membuat lembaga legislatif menjadi tidak kredibel dan rakyat menjadi *distrust*. Karena itu, tidaklah mengherankan bila ada banyak kasus yang sulit dibantah, ada dugaan terjadinya politik uang pada berbagai pemilihan kepala daerah. Berbagai kasus di atas menunjukkan beberapa hal lain yang selalu menyertai isu korupsi, yaitu: adanya proses "tarik-menarik" kepentingan antara elit partai di pusat dan kepentingan elit partai di daerah, proses pembelajaran politik di dalam mengelola konsolidasi dengan ratusan ribu saja, orang rela melakukan tindak kriminal untuk membunuh orang lain. Akibat yang paling mengkhawatirkan, setiap masalah atau pertikaian pendapat yang muncul diselesaikan dengan kekerasan sehingga kerusuhan terjadi di

mana-mana. Hukum tidak lagi bersifat responsif, tetapi instrumen untuk memperluas kewenangan kekuasaan "*memeras*" rakyat alas nama peraturan daerah dan melegalisasi kesewenangan. Hukum dimaknai bekerja secara prosedural tetapi kehilangan makna substantif dan spiritualitasnya. Akibat lebih lanjut lainnya, *judicial corruption* juga bisa berkaitan dengan proses investasi. Para investor banyak yang tidak mau mengambil resiko di bidang bisnis tanpa jaminan kepastian hukum. Kepastian itu tidak hanya di dalam relasinya dengan kepentingan kekuasaan saja dan berkaitan dengan perlindungan usaha alas proyek yang melibatkan pemerintahan, tetapi juga jaminan kepastian hukum bila terjadi sengketa dengan rekan bisnisnya maupun dengan para customer-nya.<sup>58</sup> Korupsi jelas menyuburkan jenis kejahatan lain di dalam masyarakat. Melalui korupsi sindikat kejahatan atau penjahat perseorangan dapat membengkokan hukum, menyusupi organisasi negara dan mendapatkan kehormatan.<sup>59</sup>

Begitu luas dampak korupsi karena terjadi pembiaran terhadap kejahatan korupsi, tidak pernah ada usaha serius dari pemerintah untuk memberantas korupsi secara serius dan sistematis, baik itu pada pemerintahan Orde Baru (Orba) maupun saat setelah terjadinya reformasi.

---

<sup>58</sup>Iskandar Sonhadji, "Perilaku Korupsi dan Dampaknya", artikel ini diakses pada 20 November 2017 dari [www.nu-antikorupsi.or.id](http://www.nu-antikorupsi.or.id)

<sup>59</sup>Sayyid Hsusein Alatas, *Korupsi Sifat Sebab Dan Fungsi*, (Jakarta: LP3ES, 1987), h.186

## **BAB IV**

### **ANALISA DATA**

#### **A. Ketidakwenangan KPK Mengeluarkan SP3 Menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002**

Dalam pelaksanaan tugasnya KPK tidak diberi wewenang untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan demi untuk melancarkan kinerja KPK, dan untuk menghindari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menjadikan SP3 sebagai peluang untuk lolos.

Tetapi dengan tidak diberi wewenang KPK untuk mengeluarkan SP3 artinya kasus yang ditangani KPK adalah kasus yang sangat serius dan masuk dalam tindak pidana khusus sehingga KPK dalam penanganannya harus adanya kehati-hatian jangan sampai kasus yang ditangani KPK melanggar asas kesamaan di mata hukum, karena semua warga negara sama di mata hukum.

Dengan adanya pasal 40 Undang-Undang KPK ini sangat membantu pihak penyidik dalam menangani kasus-kasus korupsi di Negara ini, Karena penyidikan tidak dapat dihentikan sampai dengan pengadilan. Artinya kasus ini kasus serius sehingga benar-benar butuh penegak hukum yang luar biasa karena kasus korupsi tergolong kasus kejahatan yang luar biasa karena merugikan rakyat serta negara.

## **B. Pandangan Siyasah Terhadap Ketidakwenangan KPK Mengeluarkan SP3**

Kemudian dalam konteks siyasah kita ketahui bahwa siyasah adalah mengatur atau pemimpin yang membawa pada kemaslahatan umat, artinya dengan adanya kasus korupsi ini bukan untuk kemaslahatan umat tetapi untuk menyengsarakan umat. Maka dari itu dalam kasus penanganan korupsi KPK tidak diberi wewenang untuk mengeluarkan SP3.

Keterkaitan siyasah dalam skripsi ini adalah tergolong dalam siyasah dusturiyah yang dapat diartikan bahwa siyasah dusturiyah mengatur antara Negara dan lembaga Negara demi untuk kemaslahatan umat.

Dalam prinsipnya, mengapa KPK tidak diberi wewenang mengeluarkan SP3 ini agar kasus ini benar-benar jelas dan tidak terhenti ditengah jalan seperti kasus-kasus pidana lainnya, kemudian dalam konteks fiqh siyasahnya masuk dalam prinsip al-adalah (keadilan dan keseimbangan), prinsip ini mengandung penegakan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam bidang hukum, ekonomi, politik dan budaya, karena sikap adil tersebut merupakan bagian dari pentingnya keberadaan suatu hukum. Dan keadilan dalam konteks ini mengadili sang koruptor atau pemimpin yang berkhianat dengan rakyat dan Negara nya.

Dari definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa dengan tidak diberi wewenang KPK dalam mengeluarkan SP3 ini sangat mendukung pihak berwajib dalam menangani kasus korupsi, karena jika Lembaga KPK diberi wewenang mengeluarkan SP3 maka kasus korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa ini nasibnya akan sama dengan kasus-kasus lain.

Maka dengan adanya pasal 40 Undang-Undan Nomor 30 tahun 2002 ini benar-benar sangat membantu pihak penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya serta membantu penegakkan kebenaran di Negara ini.

p





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, terkait dengan ketidakwenangan KPK mengeluarkan SP3, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Dengan tidak adanya wewenang untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), maka oknum yang suka mempermainkan hukum dengan cara jual beli kasus tidak akan mudah lagi melakukannya. KPK tidak diberi kewenangan mengeluarkan SP3 berdasarkan pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak lain agar KPK mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Tanda bukti yang kuat cukup dan dipastikan KPK tidak akan salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, prinsip ini juga memperlihatkan keseriusan KPK dalam memberantas korupsi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang.
2. Ketidakwenangan KPK untuk mengeluarkan SP3 yang didasarkan pada pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002, dalam pandangan siyasyah pemerintah memiliki kewenangan mengatur lembaga-lembaga

pemerintah bahkan swasta guna mewujudkan kemaslahatan / kebaikan bagi warga Negara.

## **B. Saran-saran**

1. Untuk mencegah adanya kesewenang-kesewenangan, Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menuntut dan mengadili seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana korupsi, hendaknya pemberlakuan ketentuan ketidakwenangan mengeluarkan SP3 oleh KPK dalam menentukan status tersangka harus dilakukan secara ketat dan selektif. Karena tanpa kehati-hatian tersebut dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dalam pemberlakuan (khusus penegakan) hukum.
2. Penegakan supremasi hukum tanpa pandang bulu dan bebas Korupsi harus ditegakkan, peran maksimal dari penegak hukum, khususnya KPK, serta masyarakat sangat diperlukan guna mencapai cita-cita tersebut. Sehingga nantinya negara Indonesia akan menjadi negara yang makmur, tentram, aman, sejahtera, serta terbebas dari korupsi.
3. Hendaknya dilakukan kajian yang lebih mendalam terhadap penerapan ketentuan ketidakwenangan mengeluarkan SP3 oleh KPK, sehingga nantinya implikasi yang ditimbulkannya akan terasa manfaatnya untuk rakyat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 2004).
- Ali As says Muhammad, *Tafsir Ayat Al Ahkam*, (Beirut: DarulAlfikiri. Jilid 2)
- Anit Arbi, ed. *Korupsi di Negeri Kazan Beragama ikhtiar membangun fiqh anti korupsi*, (Jakarta: P3M, 2004)
- Anwar, *Jenis Korupsi*, (Jakarta: CV PustakaSetia, 2006).
- Dapar temen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*- Pusat Bahasa, edisi Ke-4, (Jakarta: PT. Gramedia PustakaUtama, 2008).
- Djamil R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: CV Rajawali, 1990).
- Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, cet ke-4 (Jakarta :Kencana, 2009).
- Fauzan Achmad, *Perundang-undangan lengkap tentang peradilan umum, peradilan khusus, pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan HAM, pengadilan Korupsi*, (Jakarta: 2005).
- FuadNoeh Munawar, *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi*, cet pertama (Jakarta: Zahru'l hakim, 1997).
- Hamzah Andi, *Pemberantas Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006).
- Hamzah Andi, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Cet Ke-2 (Jakarta: SinarGrafika, 2005).
- Hajar al-Asqalani Ibnu, *Bulughul Maram min Adillati al-Ahkam*, (Surabaya: DarulIlmu, 2012).

Harahap Yahya, *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).

Johan Budi, *Hukuman Bagi Korupsi*, Artikel Republikan, 2017.

*Jurnal Al-addalah Korupsi dalam islam*, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Klitgaard Robert, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2005).

*KUHP dan KUHP*, (Bandung: Citra Media Kencana, 2009).

Lopa Baharuddin, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2001).

Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, cetke -1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Purnomo Bambang, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta, Gajah Mada, 1998).

Pulungan Suyuthi, *Fiqh Siyasah Ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta, Raja Wali Pers, 1993),

Revida Erika, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Solusinya*, Artikel Transparansi, 2017.

Sudjana Eggi, *Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati*, Surabaya: JP BOOKS, 2008).

Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007).

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 *Tentang KPK*, (Yogyakarta : Pustaka amahardika, 2016).

